

## MANFAAT PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) BAGI MASYARAKAT DESA NAPAN WILAYAH PERBATASAN RI-RDTL KECAMATAN BIKOMI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Gundisaldis Taena<sup>1</sup>, Thomas Susu<sup>2</sup>, Rodriques Servatius<sup>3</sup>

[taenagundisaldis@gmail.com](mailto:taenagundisaldis@gmail.com)<sup>1</sup>, [mikaeltomisusu@gmail.com](mailto:mikaeltomisusu@gmail.com)<sup>2</sup>, [rodriquesservas@gmail.com](mailto:rodriquesservas@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRACT

*This research is titled, Benefits of the Development of Cross-Border Posts (PLBN) for the Community of Napan Village, RI-RDTL Border Area, North Bikomi District, TTU Regency. The main problem in this study is how are the factual benefits of the existence of PLBN for the people of Napan Village, RI-RDTL border area, North Bikomi District, TTU Regency. To explain the main problem above, the theory used in this study is the Benefits of the Development of Cross-Border Posts (PLBN) for the People of Napan Village in the RI-RDTL Border Area, which ignores the social and economic aspects of the community on the border. The method used in this study is Qualitative Descriptive with data collection techniques, namely; interviews, observations, and documentation. The variables in the study were directed at the social and economic aspects of border communities. The results of the study show; that the existence of PLBN has a positive impact on, 1) Education: The existence of PLBN encourages increased awareness of the importance of education, although there is still a shortage of educators at the PAUD and elementary levels. 2) Health: Health facilities are available and access to services is improving, although there is still a shortage of medical equipment and medicines for emergency management. 3) Infrastructure: The development of PLBN accelerates the improvement of infrastructure such as roads, bridges, and housing, although hamlet roads and telecommunication networks still need attention. 4) Mobility of Goods and Services: Economic activities are still local, but PLBN has strategic potential in supporting cross-border mobility in the future. 5) Economic Growth Center: PLBN is a trigger for new economic growth through the increase of MSMEs, export-import activities such as "Kutulaka", and business opportunities that increase people's income. Based on the results of the research, it can be concluded that the construction of PLBN in Napan Village makes a real contribution to improving the quality of life of border communities through advances in the education, health, infrastructure, and mobility of goods and services. In addition, PLBN also encourages the growth of new economic centers that strengthen community business activities and open up cross-border trade opportunities, making it a driver of socio-economic development in the border area of the Republic of Indonesia and RDTL.*

**Keywords:** *Benefits Of PLBN Development For The Border Communities Of RI-RDTL.*

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Bagi Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU. Dengan masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Manfaat Faktual Dari Adanya PLBN Bagi Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU. Untuk menjelaskan masalah pokok diatas maka, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-RDTL, yang mengacuh pada pada Aspek sosial dan ekonomi masyarakat di perbatasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian diarahkan pada aspek sosial maupun ekonomi masyarakat perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan; bahwa keberadaan PLBN memberikan dampak positif terhadap, 1) Pendidikan: Keberadaan PLBN mendorong peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan, walaupun masih

terdapat kekurangan tenaga pendidik pada jenjang PAUD dan SD. 2) Kesehatan: Fasilitas kesehatan telah tersedia dan akses layanan meningkat, meski masih ada kekurangan alat medis dan obat-obatan untuk penanganan darurat. 3) Infrastruktur: Pembangunan PLBN mempercepat peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan perumahan, walau jalan dusun dan jaringan telekomunikasi masih perlu perhatian. 4) Mobilitas Barang dan Jasa: Aktivitas ekonomi masih bersifat lokal, namun PLBN memiliki potensi strategis dalam mendukung mobilitas lintas negara di masa depan. 5) Pusat Pertumbuhan Ekonomi: PLBN menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan UMKM, aktivitas ekspor-impor seperti "Kutulaka", serta peluang usaha yang memperbesar pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan PLBN di Desa Napan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan melalui kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta mobilitas barang dan jasa. Selain itu, PLBN juga mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang memperkuat aktivitas usaha masyarakat dan membuka peluang perdagangan lintas negara, menjadikannya sebagai penggerak pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan RI-RDTL.

**Kata Kunci:** Manfaat Pembangunan PLBN Bagi Masyarakat Perbatasan RI-RDTL.

## PENDAHULUAN

Secara umum, tujuan pembangunan nasional negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh pelosok wilayahnya. Beberapa masalah yang terjadi seperti kemiskinan, kesenjangan kemajuan pembangunan antar kawasan wilayah adalah bukti bahwa dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional secara umum belumlah tercapai. Selain masalah lain yang ditimbulkan sebagai konsekuensi ikutannya. Masalah ketenagakerjaan, masalah lingkungan hidup dan masalah lain yang berhubungan dengan kependudukan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dibenahi secara tuntas.

Salah satu wilayah yang tingkat perkembangan pembangunannya kerap kali tertinggal adalah wilayah perbatasan, yang memiliki kecenderungan termarginalkan dikarenakan realisasi pembangunan yang hanya berfokus pada wilayah pusat. Secara konseptual wilayah perbatasan adalah wilayah yang menjadi batas antar wilayah administrasi. Dengan kata lain sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi namun berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lainnya sehingga diklasifikasikan sebagai wilayah pinggiran. Dalam upaya pemerataan pembangunannya sendiri, pemerintah telah berusaha untuk pemeratakan hasil pembangunan dengan tujuan mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah yang tingkat pembangunannya tertinggal.

Negara didirikan dan dibangun berdasarkan karakteristik tertentu dalam suatu kesatuan wilayah dan penduduk (warga negara) tertentu. Kesatuan wilayah merupakan integrasi atau penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Kesatuan penduduk atau warga negara sebagai landasan kuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tersambungnyanya komunitas-komunitas suku-bangsa yang berada dalam wilayah yang terkait secara ras dan adat kebudayaan serta kohensivitas sosial tertentu. Berdasarkan kesadaran tersebut kelompok-kelompok suku bangsa menerima dan mengakui pelembagaan negara menurut konstitusinya.

Dalam terminologi negara modern masih terdapat satu persyaratan tambahan terhadap eksistensi suatu negara yakni pengakuan kedaulatan dari negara-negara lainnya. Pengakuan ini memastikan bahwa negara tersebut diakui secara internasional dalam hubungan diplomatik dan hukumnya. Tanpa pengakuan kedaulatan, sebuah negara mungkin menghadapi tantangan dalam partisipasi dalam forum internasional dan keanggotaan dalam organisasi global.

Indonesia merupakan negara maritim terbesar ketiga di dunia berdasarkan panjang garis pantai yang dimilikinya. Panjang garis pantai Indonesia mencapai sekitar 54.750

kilometer. Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam konteks kedaulatan global dengan wilayah perairan yang luas dalam mendukung potensi ekonomi kedaulatan besar yang terletak pada garis katulistiwa. Secara substansif yang menjadikannya berbatasan dengan beberapa negara/memulai konsensi lautan (archipelago) maupun pulau/kepulauan (kontinental).

Kalimantan dan Irian Jaya merupakan dua pulau besar yang terhubung dengan negara tetangga melalui daratan atau perbatasan darat yang strategis bagi hubungan regional dan kegiatan ekonomi lintas negara. Walaupun demikian, sejak tahun 1999 Timor Timur (sekarang Timor-Leste) memperoleh kemerdekaan setelah melalui referendum yang menandai pemisahan dari Indonesia, sehingga terbentuklah RDTL sebagai suatu negara yang membelah pulau Timor sebagai bagian dari dua negara yaitu Indonesia dan RDTL.

Kawasan perbatasan suatu Negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kawasan perbatasan sangat strategis untuk pembangunan nasional karena kegiatan disana akan berdampak penting terhadap kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar, saling mempengaruhi kegiatan di wilayah lain yang berbatasan dan mempengaruhi kondisi keamanan regional dan nasional.

Pada tahun 2014, Undang-Undang Desa diterbitkan dengan tujuan utama memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk meningkatkan partisipasi desa dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu fokusnya adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan kapasitas desa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur mekanisme pengelolaan dana desa, yang memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar dan transparan untuk berbagai kebutuhan desa. Ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan memastikan bahwa desa-desa, termasuk yang berada di wilayah perbatasan, dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri.

Mulai tahun 2015, pemerintah mengusung visi membangun dari pinggiran. Visi tersebut tertuang dalam program Nawacita, yang intinya adalah pembangunan difokuskan pada desa-desa dan daerah perbatasan untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Program ini melibatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan anggaran transfer dan dana desa, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembangunan yang merata, mengurangi kesenjangan antara pusat dan pinggiran serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi di seluruh negeri.

Program Nawacita tersebut memberikan bantuan dana langsung kepada setiap desa dalam rangka pembangunan fisik dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Bantuan ini dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di tingkat desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan pusat kesehatan. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya lokal yang dimiliki desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Dengan cara ini, desa diberdayakan agar mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Bantuan dana langsung memungkinkan desa untuk

merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, sehingga pembangunan lebih terarah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, pemerintah dapat membuat regulasi berupa payung hukum khusus yang dijadikan legal formal; dan sebuah badan/lembaga otorita yakni Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BP2KP) yang melibatkan pemerintah daerah, swasta serta masyarakat lokal sebagai ujung tombak pembangunan. Pelaksanaan konsep ekonomi politik pada masa otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum mampu mensinergikan kinerja aparatur pemerintah pusat dan daerah (lemahnya hubungan pemerintah pusat dan daerah), termasuk sinkronisasi dan koordinasi program kerja pembangunan di kawasan perbatasan. Setidaknya inilah strategi yang diimplementasikan untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Selain itu, kawasan perbatasan dipandang sebagai beranda terdepan negara. Membangun masyarakat perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan (environment) secara serasi. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi, meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga. Dengan adanya RDTL, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Provinsi perbatasan termasuk dengan Australia. Situasi tersebut membuat NTT menjadi strategis karena merupakan garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan dan sebagai barometer potret pembangunan nasional.

Pembangunan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik geografis dan strategis wilayah tersebut. Menurut Luthfi (Muta'ali, 2014) bahwa pembangunan kawasan perbatasan dapat dimulai dengan mengenali terlebih dahulu potensi dan masalah yang dilihat dari karakteristik serta tilopogi kawasan perbatasan. Pembangunan harus berfokus pada pembangunan infrastruktur; seperti jalan dan jembatan untuk mengurangi isolasi wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal; seperti memberikan pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta memanfaatkan posisi geografis; yaitu untuk keamanan nasional dan memperkuat hubungan internasional dengan Negara tetangga.

Gerbang perbatasan di RDTL (Enclave Oekusi) secara administratif pemerintah berbatasan dengan Kabupaten TTU, Kecamatan Bikomi Utara. Bentangan perbatasan tersebut mencakup Desa Baas, Desa Banain A, Desa Banain B, Desa Banain C, Desa Faenake, Desa Haumeni, Desa Napan, Desa Sainoni, dan Desa Tes. Dengan demikian batas-batas wilayah administratif Kecamatan Bikomi Utara adalah sebelah selatan dengan wilayah Kecamatan Bikomi Tengah, Sebelah Utara dengan wilayah Ambenu (Timor Leste) dan Kecamatan Naibenu, sebelah Barat dengan wilayah Ambenu (Timor Leste), serta sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Miomaffo Timur.

Secara geografis, Kecamatan Bikomi Utara terletak pada 902'12" – 9027'36" LS dan 12404'12" – 12404 bujur timur, dan mencakup 9 Desa yang berbatasan langsung dengan RDTL. Gerbang perbatasan Negara terpusat pada Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur menjadi desa yang memiliki tanggung jawab "tambahan" dalam mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena alasan tersebut Indonesia menetapkan Desa Napan sebagai salah satu pintu masuk utama dengan negara Timor Leste.

Sebelum adanya gerbang perbatasan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2018, desa-desa di wilayah perbatasan umumnya menghadapi kondisi infrastruktur yang buruk dengan jalan tanah atau berbatu yang sulit diakses, terutama saat musim hujan. Jembatan dan fasilitas penyeberangan sering kali tidak memadai. Dari perspektif ekonomi sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten, dengan keterhubungan ekonomi dan pasar yang sangat terbatas. Fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah kekurangan sumber daya. Sementara layanan dasar seperti air bersih dan listrik sering kali sangat terbatas. Kehidupan sosial masih sangat bergantung pada adat dan budaya lokal dengan keterhubungan yang minim dengan dunia luar. Pengawasan dan penegakan hukum di daerah perbatasan juga kurang ketat, mempengaruhi keamanan dan administrasi.

Interaksi dengan masyarakat negara tetangga juga masih terbatas, akibatnya peluang untuk pertukaran budaya dan ekonomi juga terbatas. Dengan kondisi ini, potensi perkembangan desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, menjadikan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa Napan cukup menantang sebelum adanya perubahan melalui PLBN. Keterbatasan akses informasi dan komunikasi juga menghambat masyarakat dalam menjalin kerjasama dan mendapatkan manfaat dari peluang yang ada. Tanpa adanya inisiatif untuk meningkatkan konektivitas, masyarakat sulit untuk mengakses pasar yang lebih luas dan sumberdaya yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat perbatasan. Pembangunan PLBN diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperluas interaksi, membuka peluang baru bagi pertukaran budaya dan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat perbatasan.

Pembangunan PLBN Napan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada tahun 2020 hingga 2022 dengan pekerjaan fisik berupa pembangunan gudang sita bangunan inti, mess pegawai, wisma Indonesia, bangunan TNI, dan bangunan polri. Pembangunan tahap kedua pada tahun 2023 dengan pekerjaan fisik berupa pembangunan res area, pagar kawasan, jalan kawasan, perkuat lereng, dan meubelair, sekaligus melanjutkan pekerjaan pada zona inti dan zona sub inti yang belum selesai. Investasi pembangunan PLBN ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat keamanan di perbatasan, tetapi di harapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Walaupun, pembangunan PLBN Napan sudah rampung, namun aktivitas perlintasan di PLBN ini masih mengalami kendala. Sejak tahun 2020, kegiatan lintas batas di PLBN Napan terhenti akibat pandemi COVID-19 pembangunan PLBN Napan telah selesai dan telah diresmikan operasionalnya (Pos Kupang, 02 Oktober 2024). Akan tetapi aktivitasnya masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pihak Timor Leste dalam membuka akses perlintasan di wilayah Oesilo. Kondisi ini memerlukan upaya diplomatik yang lebih kuat antara kedua negara untuk memastikan kesepakatan pelayanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta interaksi sosial-budaya di kedua belah pihak.

Modernisasi dan pembangunan infrakstruktur seperti halnya PLBN Napan juga membawa nilai positif dan negatifnya. Masyarakat perbatasan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, tanpa kehilangan jati diri budaya mereka. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pengelolaan PLBN merupakan solusi agar masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat langsung dari kehadiran infrastruktur ini

Potensi ekonomi yang dijanjikan oleh PLBN Napan sangatlah besar. Letaknya yang strategis membuat PLBN Napan lebih dekat dengan Kota Kefamenanu di Indonesia dan Oecussi di Timor Leste dibandingkan dengan PLBN lainnya. Dengan dibukanya akses lintas batas melalui PLBN Napan, peningkatan interaksi perdagangan dan pertukaran komoditas antara kedua negara diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi lintas batas.

Pembangunan gerbang perbatasan di desa Napan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal. Salah satunya adalah penggusuran tanah yang berpotensi merugikan warga yang bergantung pada lahan untuk mata pencaharian mereka. Proses relokasi ini sering kali tidak disertai dengan solusi yang memadai, sehingga masyarakat bisa kehilangan sumber penghidupan dan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan tempat tinggal atau pekerjaan baru. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi akibat masuknya pendatang dan pekerja dari luar dapat menimbulkan ketegangan sosial, merusak hubungan antarwarga, serta mengguncang tradisi dan nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur besar untuk gerbang perbatasan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Dampak ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal yang sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar. Selain itu, peningkatan aktivitas di kawasan perbatasan dapat menambah ketergantungan ekonomi masyarakat pada proyek tersebut, yang rentan terhadap perubahan kebijakan atau pergeseran prioritas pemerintah. Masalah lain yang muncul adalah peningkatan risiko penyebaran penyakit dan masalah keamanan karena pergerakan orang dan barang yang lebih intensif, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan kesehatan masyarakat desa Napan.

Pembangunan gerbang perbatasan di desa Napan juga memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat lokal. Pertama, gerbang perbatasan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dengan membuka peluang perdagangan dan investasi, yang berpotensi mengembangkan usaha di sekitarnya. Selain itu, pembangunan gerbang sering kali disertai perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas kesehatan, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gerbang ini juga menciptakan peluang kerja baru di sektor administrasi, keamanan, dan layanan publik. Akses yang lebih baik ke barang dan layanan dari negara tetangga serta peluang untuk pertukaran budaya dan sosial juga turut memperkaya pengalaman masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, gerbang perbatasan dapat menjadi katalisator kemajuan ekonomi dan sosial di desa Napan.

Sejak tahun 2020, Gerbang Perbatasan telah mengalami peningkatan signifikan dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan akses dan gedung pos perbatasan. Pemerintah memperkuat pengawasan untuk menangani isu keamanan dan penyelundupan dengan tambahan aparat dan teknologi pemantauan. Kerja sama internasional antara Indonesia dan Timor Leste meningkat melalui forum-forum bilateral, sementara akses yang lebih baik mendukung pengembangan ekonomi lokal. Tantangan sosial seperti migrasi ilegal yaitu pemerintah mungkin menerapkan kebijakan ketat dalam kontrol perbatasan, memperkuat pemeriksaan identitas dan meningkatkan kerjasama dengan pihak berwenang Timor Leste. Sementara dampak lingkungan dari pembangunan itu seperti deforestasi atau perubahan habitat sehingga terus diatasi melalui berbagai kebijakan.

Pembangunan perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) telah menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan hubungan bilateral dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Desa Napan adalah salah satu desa/kelurahan yang terletak di Kecamatan Bikomi Utara,

Kabupaten TTU di samping, Desa Baas, Desa Banain A, Desa Banain B, Desa Banain C, Desa Faenake, Desa Haumeni, Desa Sainoni, dan Desa Tes. PLBN Napan merupakan salah satu pintu Gerbang pada sisi utara Kabupaten TTU, selain PLBN Wini yang lebih ke Utara dan berimpitan dengan garis pantai Wini. Sebagai desa yang berada di Kecamatan Bikomi Utara yang ditempatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), telah memosisikan Desa Napan sebagai beranda terdepan Negara. Karena itu, akan terdapat berbagai konsekuensi ikutan dalam pembangunan kawasan tersebut. Argumen ini yang mendasari diperlukannya suatu kajian melalui suatu penelitian dengan judul Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan di Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan menurut Mulyana:

Penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif .

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk diangkat sebagai sebuah realitas dalam masyarakat baik itu situasi ataupun kondisinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mengarahkan kita untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, diharapkan dapat mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi. Hal ini sesuai dengan alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yakni untuk menjelaskan dan menggambarkan berbagai fenomena tentang Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan metode ini juga peneliti dapat bertindak sebagai instrument kunci. Hal ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan sumber data yang ingin dituju, sehingga dapat dikatakan memiliki peran besar dalam memilih topik penelitian, menentukan informasi, mengumpulkan data observasi partisipan dan wawancara secara mendalam hingga menganalisis data untuk memahami fenomena yang terjadi di kawasan perbatasan RI-RDTL.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hasil Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan gambaran tentang Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

Untuk memperoleh informasi dan gambaran tentang Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-RDTL

Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Kajian/analisis terhadap aspek-aspek variabel penelitian diuraikan sebagai berikut: Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi.

Aspek sosial adalah bagian dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat serta cara individu tersebut berinteraksi satu sama lain. Aspek ini juga sangat berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan mobilitas barang dan jasa mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk menunjang kehidupan yang layak. Pendidikan, misalnya, merupakan fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengetahuan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata juga menciptakan kesetaraan dan membuka peluang bagi semua individu untuk berkembang secara intelektual dan sosial.

Kesehatan juga menjadi bagian penting dari aspek sosial karena kondisi kesehatan masyarakat menentukan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Layanan kesehatan yang memadai mencerminkan perhatian sosial terhadap kesejahteraan warga negara. Infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, jalan, dan sarana transportasi memainkan peran besar dalam menunjang akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, sekaligus mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah.

Mobilitas barang dan jasa juga termasuk dalam aspek sosial karena hal ini memengaruhi ketersediaan kebutuhan pokok dan pelayanan publik. Masyarakat yang memiliki akses lancar terhadap distribusi barang dan jasa akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya dan menjalani kehidupan dengan efisien. Dengan demikian, aspek sosial tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga mencakup sistem dan fasilitas pendukung yang memungkinkan masyarakat hidup sejahtera dan saling terhubung secara harmonis.

Aspek ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan pertumbuhan kualitas dan kesejahteraan individu dalam kehidupan. Aspek ekonomi yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baru mencakup faktor-faktor yang mendorong terbentuknya wilayah atau kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, seperti peningkatan inventasi peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor industri. Kehadiran pusat pertumbuhan ini juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan efisiensi distribusi sumber daya, yang secara keseluruhan mendorong peningkatan daya saing ekonomi regional maupun nasional.

#### **Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu bidang pembangunan yang sangat mendasar karena terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada dasarnya pembangunan pendidikan diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang pendidikan. Selain itu pengembangan pendidikan juga perlu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha.

Komentar ini diungkapkan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan menyampaikan bahwa:

Sarana pendidikan di wilayah Desa Napan secara umum telah tersedia sebelum pembangunan PLBN. Untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), fasilitas sekolah sudah ada. Sekolah Menengah Pertama (SMP) pun telah tersedia, namun letaknya berada di luar desa, dengan jarak tempuh sekitar lima menit menggunakan kendaraan bermotor. Sementara itu, untuk jenjang SMA, sekolah terdekat berada di Desa Sainoni

dengan waktu tempuh kurang lebih delapan menit menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sedangkan untuk SMK, lokasinya berada di Desa Tes, yang juga memerlukan waktu perjalanan dengan kendaraan, meskipun akses ke sekolah-sekolah tersebut masih tergolong terjangkau, keberadaan fasilitas pendidikan dalam desa sendiri, terutama untuk jenjang menengah, sangat diharapkan oleh masyarakat agar anak-anak dapat belajar lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pada transportasi dan memberikan rasa aman yang lebih bagi para orang tua. Satu hal yang ingin saya tambahkan disini adalah manfaat dari pembangunan PLBN membawa keuntungan salah satunya terhadap Pendidikan. Dengan adanya PLBN ini memaksakan anak muda warga masyarakat di Napan mau tidak mau harus bersekolah yang lanjut usia mungkin dengan cara lain untuk bisa memiliki pendidikan non formal untuk menyetarakan ijazahnya kemudian bisa memiliki harapan baru dengan adanya PLBN ini untuk dapat mengakses pekerjaan yang tentunya di zaman sekarang harus memiliki ijazah<sup>1</sup>.

Komentar yang sama diungkapkan oleh Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan menyatakan bahwa:

Fasilitas pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah tersedia. Jarak dari rumah ke sekolah untuk TK dan SD sekitar 2 kilometer, sedangkan untuk SMP sekitar 3 kilometer. Untuk jenjang SMA, jaraknya cukup jauh dari rumah. Oleh karena itu, pada pagi hari, anak-anak harus menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat untuk menuju sekolah. Hal ini disebabkan oleh lokasi rumah yang berada di ujung kampung, yang menjadikan jarak tempuh ke sekolah cukup jauh<sup>2</sup>.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ibu Elena Fallo selaku warga Desa Napan menyatakan bahwa:

Untuk pembangunan sekolah dari TK hingga SMA sudah ada sebelum pembangunan PLBN. Salah satu manfaat pembangunan PLBN adalah pendidikan, karena sekarang semua pekerjaan harus membuthkan pendidikan yang jelas dan juga ijazah yang pasti sehingga menuntut banyak anak muda di Desa Napan untuk berekolah meskipun jaraknya sangat jauh. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah TK dan SD 2 kilometer, SMP sekitar 3 kilometer, sedangkan untuk SMA sekitar 5 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Dan untuk SMA/SMK letak sekolah cukup jauh dari Desa karena letak sekolahnya berada di Desa Sainoni<sup>3</sup>.

Komentar yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Imelda Abi selaku Aparat Desa Napan menyatakan:

Pembangunan sekolah dari jenjang TK hingga SMA telah tersedia sebelum PLBN ini dibangun. Jarak dari rumah ke TK dan SD sekitar 2 kilometer, sementara SMP berjarak sekitar 3 kilometer. Waktu tempuh menuju SMP adalah sekitar 5 menit dengan kendaraan. Adapun untuk SMA, letaknya cukup jauh dari Desa Napan, yaitu di Desa Sainoni. Dan manfaat dari pembangunan PLBN ini memaksakan banyak anak muda untuk bersekolah karena di zaman sekarang semua pekerjaan itu harus membutuhkan pendidikan yang pasti<sup>4</sup>.

Komentar yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Angelina Naihely selaku warga Desa Napan menyatakan:

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Elena Fallo selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Imelda Abi selaku Aparat Desa Napan, tanggal 18 Februari 2025

Untuk sarana dan prasarana pendidikan di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU telah tersedia dari pendidikan TK sampe dengan SMA sebelum dibangunnya PLBN. Sehingga dengan pembangunan PLBN ini semakin banyak anak yang bersekolah karena adanya informasi yang semakin terbuka tentang pendidikan bagi masa depan masyarakat itu sendiri. Jarak ke TK dan SD sekitar 2 kilometer, sementara SMP berjarak sekitar 3 kilometer. Waktu tempuh menuju SMP adalah sekitar 5 menit dengan kendaraan. Adapun untuk SMA, letaknya cukup jauh dari Desa Napan, yaitu di Desa Sainoni.



Gambar 1. Gedung Paud dan TK Desa Tes  
*Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Februari 2025*



Gambar 2. Gedung SDK Tes  
*Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Februari 2025*

Untuk mengetahui jawaban informan terkait tenaga pengajar sekolah di Desa Napan cukup atau belum? Berdasarkan jawaban informan yang ada mengatakan bahwa tenaga pengajar sudah cukup tetapi tenaga pengajar pada Paud dan SD masih ada kekurangan.

Pernyataan diungkapkan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan menyatakan bahwa:

Tenaga pengajar untuk SD menurut saya cukup karena ada 3 guru ASN dan 4 guru komite jadi jumlah guru SD ada 7 orang tetapi ada beberapa informasi yang saya dapat bahwa sementara sudah ada yang mulai menurus surat pensiun jadi sudah pasti ada ruang yang kosong dan untuk tenaga pengajarnya mulai berkurang, sedangkan untuk guru TK/Paud masih mengalami kekurangan karena hanya ada 3 tenaga pengajar, dan untuk SMP juga sudah lebih dari cukup jumlah tenaga pengajar ada 20 orang, terlebih untuk

SMA dan SMK lebih banyak tenaga pengajarnya karena dilihat dari kualitas sekolahnya juga sudah sangat maju dan bagus<sup>5</sup>.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ibu Gedrudis Eko selaku Aparat Desa Napan menyatakan bahwa:

Kalau untuk tenaga pengajar itu menurut saya sudah cukup karena di paud itu ada 3 tenaga pengajar, SD ada 7 tenaga guru dan untuk SMP itu cukup sekali karena ada 20 tenaga guru sedangkan untuk SMA lebih lagi karena kualitas sekolahnya juga sangat bagus<sup>6</sup>.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Bapak Jose Beno selaku warga di Desa Napan menyatakan bahwa:

Untuk tenaga pengajar di Paud ada 3 orang tenaga pengajar dan untuk SD menurut saya masih kurang karena mengingat sekarang banyak guru yang sudah mulai pensiun sehingga sekarang dari sekolah masih butuh tenaga untuk mengisi ruang yang kosong, kalau untuk SMP menurut saya sudah cukup begitupun SMA/SMK<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan dari jenjang TK hingga SMA/SMK umumnya sudah tersedia sebelum pembangunan PLBN, meskipun sebagian sekolah menengah masih berada di luar desa dan memerlukan akses transportasi. Keberadaan PLBN memberikan dampak positif terhadap kemudahan aksesibilitas pendidikan karena mendorong kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melanjutkan pendidikan formal maupun nonformal sebagai bekal menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin mengutamakan kualifikasi pendidikan. Meskipun tenaga pengajar untuk jenjang SMP hingga SMA/SMK dinilai cukup, masih terdapat kekurangan tenaga pendidik pada jenjang PAUD dan SD, terutama karena adanya guru yang mulai pensiun, sehingga diperlukan perhatian lebih dalam pemenuhan tenaga pendidik di tingkat dasar.

#### **Kemudahan Aksesibilitas Kesehatan**

Pembangunan kesehatan di kawasan perbatasan harus menjadi pusat perhatian bagi pemerintah karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, bidang kesehatan menjadi faktor utama untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Persoalan pembangunan kesehatan sangat terkait dengan kualitas lingkungan (sanitasi pemukiman), pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan juga tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan informan yang ada, bahwa pembangunan di bidang kesehatan seperti pembangunan gedung puskesmas/polides sudah ada dan para tenaga medis atau para petugas kesehatan selalu ada untuk memperhatikan kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan beliau menyampaikan bahwa:

Pembangunan Puskesmas di Desa Napan telah dilakukan sebelum adanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan Puskesmas tersebut sangat membantu masyarakat karena kualitas pelayanannya sudah setara dengan pelayanan di rumah sakit pada umumnya. Tenaga medis atau petugas kesehatan selalu ada selama 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa Napan. Sehingga masyarakat merasa sangat puas dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. salah satu manfaat pembangunan PLBN ini adalah Kesehatan dengan adanya PLBN, infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan ikut berkembang, termasuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan akses jalan yang lebih baik, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Gedrudis Eko selaku Aparat Desa Napan, tanggal 18 Februari 2025

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

pelayanan medis yang lebih cepat, aman, dan terjangkau. Selain itu, meningkatnya aktivitas dan perhatian pemerintah di daerah perbatasan juga mendorong hadirnya tenaga medis dan program kesehatan yang lebih merata<sup>8</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Jose Beno, salah satu warga Desa Napan. Ia menjelaskan bahwa:

Sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan posyandu, namun kini sudah tersedia fasilitas Puskesmas yang pembangunannya dilakukan sebelum adanya proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan Puskesmas ini sangat membantu masyarakat, karena ketika ada yang sakit atau membutuhkan pertolongan medis, mereka dapat langsung mengakses layanan di Puskesmas terdekat. Sedangkan untuk pelayanan tenaga medis sangat baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>9</sup>.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Bapak Antonius Kolo selaku Tokoh Adat di Desa Napan menyatakan bahwa:

Sebelum adanya pembangunan PLBN, pembangunan Puskesmas sudah dibangun terlebih dahulu. Dengan adanya Puskesmas ini sangat membantu masyarakat Desa Napan karena ketika ada yang membutuhkan pertolongan medis tidak perlu ke desa lain untuk meminta bantuan karena sudah tersedia gedung Puskesmas yang jaraknya tidak jauh dari Desa sendiri<sup>10</sup>.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Angelina Naihely selaku warga Desa Napan, menyatakan bahwa:

Pembangunan Puskesmas telah dilakukan lebih dahulu sebelum pembangunan PLBN, dan sejauh ini pelayanan para petugas kesehatan sangat baik, sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan<sup>11</sup>.

Selain itu, Ibu Florina Siki selaku aparat Desa Napan juga menyatakan bahwa:

Pembangunan fasilitas Puskesmas maupun Polindes sudah ada sejak sebelum pembangunan PLBN. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat yang memerlukan obat-obatan atau layanan kesehatan tidak perlu lagi pergi ke Puskesmas di luar desa, karena pelayanan sudah tersedia dan mudah diakses di dalam wilayah Desa Napan<sup>12</sup>.



Gambar 3. Gedung Puskesmas Desa Napan  
*Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Februari 2025*

Untuk mengetahui jawaban informan mengenai apakah penyediaan obat-obatan dan tenaga medis di puskesmas/polindes sudah cukup untuk melayani dan mengobati masyarakat ataukah belum terlaksana secara menyeluruh dan merata. Berdasarkan jawaban dari informan bahwa untuk sekarang penyediaan tenaga medis sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat, akan tetapi penyediaan obat-obatan masih sangat terbatas.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Antonius Kolo selaku Tokoh Adat di Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ibu Angelina Naihely selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ibu Florina Siki selaku Aparat Desa Napan, tanggal 19 Februari 2025

Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan. Beliau menjelaskan bahwa:

Jumlah tenaga medis di Puskesmas Desa Napan tergolong cukup memadai. Berdasarkan pengamatan saya, terdapat dua orang dokter yang bertugas, didukung oleh beberapa tenaga medis lainnya seperti perawat dan bidan. Keberadaan tim medis ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas sudah cukup baik untuk pelayanan dasar. Namun, dalam situasi darurat atau kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien biasanya akan dirujuk ke puskesmas lain atau rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Oleh karena itu, meskipun pelayanan di Puskesmas Desa Napan telah berjalan dengan baik, masih dibutuhkan peningkatan pada sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang penanganan kasus-kasus darurat secara lebih maksimal<sup>13</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Gedrudis Eko selaku aparat Desa Napan. Beliau menjelaskan bahwa:

Jumlah tenaga medis di Puskesmas Napan sudah cukup banyak dan lengkap, mulai dari dokter, bidan, serta tenaga medis lainnya. Untuk ketersediaan obat-obatan, saat ini sudah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tetapi untuk penyediaan fasilitas seperti obat-obatan juga sudah lumayan cukup dan mungkin kekurangannya pada fasilitas lain seperti alat-alat medis, tetapi pelayanannya sangat bagus dan tidak membuat masyarakat menunggu lagi<sup>14</sup>.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Angelina Naihely, salah satu warga Desa Napan. Ia menyampaikan bahwa:

Jumlah tenaga medis di Puskesmas Napan sudah sangat mencukupi. Dan setau saya kurang lebih ada 60 tenaga medis yang berkerja di puskesmas dan pelayanannya juga sangat bagus. Selain itu, ketersediaan obat-obatan di Puskesmas juga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengobatan masyarakat sehari-hari<sup>15</sup>.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Maria K. Mano selaku pengusaha UMKM menyatakan bahwa:

Untuk jumlah tenaga medis di Puskesmas sudah cukup, setau saya jumlah tenaga medis sekitar enam puluhan. Sedangkan untuk penyediaan obat-obatan juga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam pengobatan masyarakat yang membutuhkan<sup>16</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber dapat disimpulkan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Polindes telah dilakukan sebelum pembangunan PLBN dan telah memberikan dampak positif bagi kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat. Keberadaan tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan bidan, dinilai sudah cukup dan mampu memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan pada penyediaan obat-obatan dan sarana medis tertentu, terutama untuk penanganan kasus darurat yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Secara umum, pembangunan PLBN turut mendorong peningkatan infrastruktur dan perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan di wilayah perbatasan, yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Gedrudis Eko selaku Aparat Desa Napan, tanggal 18 Februari 2025

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Angelina Naihely selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Maria K. Mano selaku Pengusaha UMKM Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

## **Infrastruktur Jalan**

Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting dilakukan untuk memperkuat fungsi internal dan eksternal dalam mendukung perkembangan wilayah perbatasan. Maka seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan perlu dilengkapi untuk menunjang aktivitas masyarakat Desa Napan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan jaringan komunikasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Dengan infrastruktur yang baik, potensi ekonomi lokal dapat dimaksimalkan dan ketahanan sosial masyarakat di daerah perbatasan akan semakin kuat. Jawaban informan berkaitan dengan indikator, apakah pemerintah sudah membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, rumah layak huni pos keamanan dan pembangunan jalan tikus/ jalan pintas di Desa Napan.

Berdasarkan informan yang ada bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan rumah layak huni sudah ada perhatian secara serius dari pihak pemerintah pusat dalam pembangunan, sehingga desa Napan sudah tidak tertinggal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan. Beliau menyatakan bahwa:

Pembangunan infrastruktur jalan raya di Desa Napan sangat mendukung aktivitas masyarakat, terutama setelah adanya pembangunan PLBN. Sebelumnya, akses transportasi cukup sulit dan terbatas, namun kini mobilitas warga menjadi lebih mudah. Pembangunan jalan nasional telah memberikan dampak positif, terutama dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan infrastruktur jalan saat ini masih berfokus pada jalur utama atau jalan negara. Sementara itu, jalan di wilayah dusun belum mendapatkan perbaikan yang memadai dan masih membutuhkan perhatian lebih lanjut dari pemerintah desa maupun pihak terkait. Untuk infrastruktur lainnya seperti jembatan, sudah ada bantuan dari pemerintah melalui program pembangunan jalan “Sabuk Merah” yang juga turut meningkatkan akses antar wilayah. Untuk bantuan rumah layak huni dari pemerintah sudah mulai diberikan sejak tahun 2021. Dari total sekitar 322 Kepala Keluarga yang terdata, baru sekitar 20 KK yang telah menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap bantuan serupa dapat terus dilanjutkan agar lebih banyak warga yang merasakan manfaat tersebut. Dari pembangunan PLBN banyak membawa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat sekitar yaitu mendapatkan peluang kerja seperti sekarang ada beberapa warga kita yang berjumlah enam puluh enam orang yang kemudian direkrut sebagai tenaga kerja di dalam gedung PLBN<sup>17</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Jose Beno, salah satu warga Desa Napan. Ia menyampaikan bahwa:

Sejak tahun 2020, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Napan telah mengalami banyak kemajuan. Perbaikan telah dilakukan pada jalan lintas negara, jalan menuju lahan pertanian, serta jalan lingkungan yang menghubungkan ke masing-masing dusun. Selain itu, pembangunan jembatan juga telah dilakukan sebagai bagian dari proyek pembangunan PLBN. Dengan adanya pembangunan ini, seluruh infrastruktur jalan di Desa Napan kini sudah dapat diakses dengan lebih mudah dan nyaman oleh kami seluruh masyarakat Napan. Karena itu pembangunan PLBN membawa keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar terkhususnya pada peluang pekerjaan dimana sekarang banyak masyarakat yang direkrut untuk bekerja di PLBN. Sedangkan untuk bantuan rumah layak huni dari pemerintah juga telah diterima oleh sebagian warga. Sebelumnya, banyak rumah

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

di Desa Napan masih menggunakan atap alang-alang dan dinding dari kayu. Namun, dengan adanya bantuan tersebut, sebagian besar rumah kini telah beralih menggunakan tembok secara menyeluruh, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi penghuninya<sup>18</sup>.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kalisto Atolas, salah satu warga Desa Napan yang mendapatkan bantuan rumah. Ia menyampaikan bahwa:

Dengan adanya pembangunan PLBN, infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan di Desa Napan telah mengalami perbaikan melalui bantuan dari pemerintah pusat. Dari pembangunan tersebut ini sangat membantu kami masyarakat dalam memperlancar mobilitas dan mendukung aktivitas sehari-hari di lingkungan desa. Selain itu, untuk program bantuan rumah layak huni dari pemerintah telah direalisasikan, dan saya sendiri termasuk salah satu warga yang menerima bantuan tersebut. Bantuan ini sangat berarti bagi kami masyarakat karena mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal dan taraf hidup secara keseluruhan<sup>19</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Antonius Kolo selaku tokoh adat Desa Napan. Ia menyampaikan bahwa:

Pembangunan jalan raya di Desa Napan telah mengalami perbaikan, mengingat jalan tersebut kini berstatus sebagai jalan antar negara. Namun, hingga saat ini jalan-jalan di wilayah dusun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masih menggunakan jalan sertu (kerikil padat) sebagai akses utama. Sedangkan untuk sejumlah jembatan di desa sudah mengalami perbaikan, yang turut mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Sementara itu, untuk program rumah layak huni, sejak masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya belum ada bantuan yang diterima. Namun, baru-baru ini pemerintah telah menyalurkan bantuan pembangunan sebanyak 20 unit rumah, dan ada juga informasi mengenai bantuan tambahan dari Presiden tetapi sampe saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut<sup>20</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Maria K. Mano selaku pengusaha UMKM di Desa Napan. Ia menyatakan bahwa:

Dengan adanya pembangunan PLBN, telah dilaksanakan proyek pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan nama "Sabuk Merah" untuk mendukung konektivitas lintas batas negara. Melalui proyek ini, jalan raya dan jembatan di wilayah Desa Napan telah diperbaiki, sehingga kini terlihat lebih baik dan sangat membantu aktivitas masyarakat di sekitarnya. Selain itu, untuk bantuan rumah layak huni dari pemerintah sudah mulai disalurkan ke beberapa warga desa telah menerima bantuan tersebut<sup>21</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Florina Siki selaku aparat Desa Napan. Ia menyampaikan bahwa:

Kondisi jalan raya di Desa Napan saat ini sudah cukup baik, karena telah mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Namun, untuk jalan-jalan di wilayah dusun masih menggunakan jalan sertu (batu kerikil yang dipadatkan), karena belum ada perbaikan lebih lanjut. Oleh sebab itu, saya menekankan bahwa jalan dusun masih membutuhkan perhatian dari pemerintah setempat. Selain itu, sejumlah jembatan di desa sudah mendapatkan perbaikan, yang turut mendukung aksesibilitas masyarakat. Sedangkan dengan bantuan rumah layak huni dari pemerintah memang sudah ada, namun baru sebagian warga yang menerimanya. Sementara itu, masih banyak warga lainnya yang

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Kalisto Atolas selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Antonius Kolo selaku Tokoh Adat Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ibu Maria K. Mano selaku Pengusaha UMKM Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

belum mendapatkan bantuan serupa dan masih membutuhkan dukungan perumahan yang layak<sup>22</sup>.



Gambar 4. Kondisi jalan Dusun 1,2,3 dan Kampung K

Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Februari 2025

Untuk mengetahui jawaban informan mengenai pembangunan menara jaringan telekomunikasi sudah ada perhatian dari pihak pemerintah. Berdasarkan jawaban informan bahwa kondisi jaringan sudah membaik untuk jaringan kabel dan jaringan seluler tetapi masih ada gangguan jaringan telemor dari Negara tetangga Timor Leste.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan. Beliau menjelaskan bahwa:

Jaringan telekomunikasi atau menara sinyal sudah tersedia dan berlokasi di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan menara tersebut telah membantu memperbaiki kualitas sinyal di wilayah Desa Napan. Namun demikian, di beberapa lokasi masih terdapat kendala dalam membangun akses komunikasi yang merata. Tetapi masih terdapat gangguan jaringan yang masih kerap terjadi, terutama saat terjadi pemadaman listrik. Dalam kondisi seperti itu, jaringan telekomunikasi dari Timor Leste terkadang mengganggu konektivitas jaringan Telkomsel, sehingga menghambat komunikasi masyarakat secara keseluruhan<sup>23</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Elena Fallo, salah satu warga Desa Napan. Ia menjelaskan bahwa:

Menara jaringan atau tower telekomunikasi telah dibangun bersamaan dengan proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan menara tersebut sangat membantu masyarakat, karena sinyal telepon menjadi lebih baik dan mempermudah komunikasi sehari-hari. Namun masih ada gangguan jaringan masih sesekali terjadi. Salah satu penyebabnya adalah interferensi dari jaringan telekomunikasi negara tetangga, yaitu Timor Leste, yang kadang memengaruhi kestabilan sinyal di wilayah Desa Napan<sup>24</sup>.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ibu Florina Siki selaku Aparat Desa Napan, tanggal 19 Februari 2025

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>24</sup>Wawancara dengan Ibu Elina Fallo selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Angelina Naihely, salah satu warga Desa Napan. Ia menjelaskan bahwa:

Di wilayah Desa Napan terdapat dua menara jaringan telekomunikasi, yaitu menara Telkomsel dan menara XL, yang lokasinya berada di dekat kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan kedua menara tersebut membuat kualitas jaringan telepon di desa menjadi cukup baik dan stabil dalam kondisi normal. Namun demikian, kendala masih terjadi ketika terjadi pemadaman listrik. Dalam situasi tersebut, jaringan Telkomsel sering kali mengalami gangguan dan secara otomatis beralih (roaming) ke jaringan Telemor dari Timor Leste. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan jaringan dan menyulitkan komunikasi bagi masyarakat setempat<sup>25</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Imelda Abi selaku aparat Desa Napan. Ia menjelaskan bahwa:

Menara jaringan telekomunikasi telah tersedia dan berlokasi di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Keberadaan menara tersebut membantu memperkuat sinyal di wilayah desa. Tetapi gangguan jaringan masih sering terjadi, khususnya saat terjadi pemadaman listrik. Dalam kondisi tersebut, jaringan Telkomsel cenderung mengalami roaming dan secara otomatis beralih ke jaringan dari Timor Leste, sehingga mengganggu stabilitas layanan komunikasi masyarakat<sup>26</sup>.

Untuk mengetahui jawaban informan mengenai pembangunan Pos Keamanan sudah ada ataukah belum berdasarkan jawaban dari informan bahwa sekarang untuk pembangunan Pos Keamanan Perbatasan sudah ada yang terdiri dari tiga pos keamanan yang terletak di PLBN dan pelayanannya sangat bagus terhadap masyarakat Desa Napan. Keberadaan pos-pos ini tidak hanya meningkatkan rasa aman warga, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas lintas batas, sehingga mencegah tindakan ilegal seperti penyelundupan dan pelintas batas ilegal. Pos keamanan ini juga berperan aktif dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga ketertiban dan kedaulatan wilayah perbatasan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan. Beliau menjelaskan bahwa:

Pembangunan pos keamanan di wilayah perbatasan Desa Napan sudah terealisasi dengan baik, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat memuaskan. Saat ini terdapat tiga pos keamanan yang aktif, yaitu Pos TNI, Pos Brimob, dan Pos Polisi. Ketiga pos keamanan tersebut tidak hanya bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah perbatasan, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka juga turut serta menjaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan seperti Paskah dan Natal, memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, serta membantu masyarakat yang memiliki keperluan lintas batas ke negara tetangga, yakni Timor Leste<sup>27</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Jose Beno, salah satu warga Desa Napan. Ia menyampaikan bahwa:

Pembangunan pos keamanan di wilayah perbatasan telah tersedia dengan baik. Terdapat tiga pos keamanan yang aktif di Desa Napan, yaitu Pos TNI, Pos Brimob, dan Pos Polisi dan ada satu pos keamanan lagi yaitu PAM BNPP. Sehingga dengan keberadaan ketiga pos tersebut sangat membantu dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di desa. Selain menjalankan tugas pengamanan, para petugas juga sering membantu

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Angelina Naihely selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Imelda Abi selaku Aparat Desa Napan, tanggal 18 Februari 2025

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

masyarakat sekitar, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam situasi tertentu yang memerlukan dukungan dari aparat keamanan<sup>28</sup>.

Hal yang sama diungkapkn oleh Angelina Naihely selaku warga Desa Napan menyampaikan bahwa:

Kalau untuk pos keamanan sudah ada. Ada tiga pos keamanan yang aktif yaitu Pos TNI, Pos Polisi, Pos Brimob tetapi ada satu pos itu namanya Pos PAM BNPP itu juga sudah mulai aktif sampe sekarang. Dan pos-pos ini sangat membantu masyarakat sekitar terlebih kalau ada yang punya urusan di Timor Leste pasti mereka bantu terlebih untuk urusan adat karena mereka paham bagaimana adat istiadat di Timor<sup>29</sup>.



Gambar 5. Pos Keamanan Perbatasan RI-RDTL  
(Pos Brimob, Pos Polisi, Pos TNI dan Pos PAM BNPP)

Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Februari 2025

Untuk mengetahui jawaban mengenai apakah pembangunan jalan tikus sangat membantu masyarakat desa Napan atau tidak. Berdasarkan jawaban dari informan bahwa dengan adanya jalan tikus sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Napan karena mereka dapat bepergian ke Negara tetangga tanpa mengeluarkankan uang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan. Beliau menjelaskan bahwa:

Keberadaan jalan tikus di wilayah perbatasan sangat menguntungkan bagi masyarakat, tidak hanya bagi warga Desa Napan, tetapi juga bagi masyarakat dari luar desa. Jalan tikus tersebut memudahkan warga untuk melakukan perjalanan ke Timor Leste secara cepat. Meskipun PLBN telah diresmikan secara simbolis, hingga saat ini belum dibuka secara resmi untuk operasional penuh. Oleh karena itu, sebagian masyarakat, terutama yang memiliki kepentingan kerja atau keperluan mendesak di Timor Leste, masih memilih menggunakan jalan tikus sebagai alternatif akses lintas batas dan ada sebagian masyarakat biasanya melalui PLBN Wini untuk masuk ke Timor Leste. Tetapi bisa

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu Angelina Naihely selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

memalui pos keamanan yang berada di Napan namun harus memberikan informasi yang jelas agar diijinkan ke Negara tetangga<sup>30</sup>.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Bapak Francisko Tofa selaku Warga Desa Napan menyatakan:

Jalan tikus sudah ada sebelum adanya PLBN sehingga sangat menguntungkan masyarakat Desa Napan yang belum mempunyai paspor, sedangkan untuk yang sudah mempunyai paspor biasanya mau bepergian ke timor leste harus melalui PLBN Wini karena di PLBN Napan masih ditutup sehingga aktivitas di PLBN Napan belum berjalan dengan lancar<sup>31</sup>.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Martinus Taeki selaku Tokoh Adat di Desa Napan. Beliau menyampaikan bahwa:

Keberadaan jalan tikus sangat membantu masyarakat Desa Napan dalam melakukan perjalanan ke negara tetangga, Timor Leste. Hal ini dikarenakan banyak warga desa yang memiliki hubungan keluarga di Timor Leste, seperti orang tua, saudara kandung, pasangan suami istri, maupun keluarga besar yang tinggal di rumah adat. Dengan adanya jalan tikus, masyarakat dapat keluar masuk wilayah Timor Leste tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi atau melalui prosedur resmi yang lebih rumit. Sehingga, jalan ini sangat bermanfaat bagi warga dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan adat istiadat yang telah terjalin lama di wilayah perbatasan<sup>32</sup>.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Imelda Abi selaku Aparat Desa Napan menyatakan bahwa:

Untuk jalan tikus sangat membantu masyarakat di sekitar terlebih yang tidak mempunyai paspor karena dengan adanya jalan tikus ini bisa membantu banyak masyarakat untuk bisa berkunjung ke Negara tetangga terlebih ada yang mempunyai keluarga di Timor Leste atau ada yang mempunyai keperluan bisa melalui jalan tikus<sup>33</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di Desa Napan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan telah mengalami kemajuan signifikan, terutama sejak adanya proyek pembangunan PLBN. Jalan raya, jembatan, rumah layak huni, dan pos-pos keamanan telah dibangun dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan mobilitas, akses layanan dasar, serta rasa aman. Meskipun demikian, jalan-jalan di wilayah dusun masih membutuhkan perhatian karena belum sepenuhnya diperbaiki. Untuk jaringan telekomunikasi, sudah terdapat perbaikan melalui pembangunan menara, meskipun masih terdapat gangguan terutama saat pemadaman listrik dan interferensi dari jaringan Timor Leste. Keberadaan pos keamanan seperti Pos TNI, Brimob, Polisi, dan PAM BNPP sangat membantu menjaga ketertiban serta mendukung aktivitas masyarakat. Sementara itu, jalan tikus tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses alternatif ke Timor Leste, terutama bagi mereka yang tidak memiliki paspor atau memiliki hubungan keluarga di negara tetangga. Infrastruktur yang telah dibangun secara keseluruhan sangat mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan di Desa Napan.

### **Mobilitas barang dan Jasa**

Mobilitas barang dan jasa adalah proses perpindahan atau pergerakan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Tujuan utama dari mobilitas ini adalah untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Francisko Tofa selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Martinus Taeki selaku Tokoh Adat Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Imelda Abi selaku Aparat Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

konsumen di berbagai wilayah yang mungkin tidak bisa memproduksi barang atau jasa tersebut sendiri.

Pernyataan yang diungkapkan langsung oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan:

Jadi disini karena kebanyakan masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani jadi untuk hasil perkebunan seperti ubi, pisang, jagung padi dan lain-lainnya kebanyakan masyarakat hanya olah untuk menjadi makanan sehari-hari dan juga ada beberapa yang menggunakan hasil perkebunannya seperti ubi dan pisang bisa dibawah ke pasar yang berada di Kota Kefamenanu untuk di perjual belikan dan juga di olah menjadi makanan ringan dan dijual di tempat-tempat usaha kecil seperti warung dan juga kios. Sedangkan untuk mobilitas barang juga ada beberapa yang ada beberapa pengusaha yang mengambil barang dari luar seperti timor leste dan di jual di Indonesia, sehingga salah satu manfaat dari pembangunan PLBN ini adalah mobilitas barang dan jasa mengapa saya katakan seperti itu karena PLBN Napan ini sangat membantu masyarakat yang memiliki kerjasama untuk membuka usaha dengan negara tetangga Timor Leste karena setiap barang usaha yang masuk dari Timor Leste harus melalui PLBN dan juga pos-pos keamanan<sup>34</sup>.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Gedrudis Eko selaku Aparat Desa Napan:

Untuk hasil perkebunan seperti jagung, ubi dan hasil perkebunan lainnya itu hanya diolah untuk dikonsumsi sendiri atau untuk kebutuhan sehari-hari saja tetapi ada beberapa yang hasil perkebunannya ini diolah menjadi bahan makanan lalu dijual ke konsumen atau bisa dibawah ke pasar untuk dijual, tetapi untuk di bawah ke dalam Negara tetangga seperti Timor Leste tidak ada<sup>35</sup>.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan menyatakan bahwa:

Hasil perkebunan seperti jagung, ubi, pisang dan lain-lainnya biasanya diolah untuk makanan sehari-hari sedangkan mau diolah untuk dipasarkan itu hanya pada orang-orang tertentu saja, dan untuk dikirim ke Timor Leste menurut penglihatan saya sampe saat ini belum ada karena hasil perkebunan antara kita dengan Negara tetangga itu sama<sup>36</sup>.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pengusaha UMKM di Desa Napan yaitu ibu Maria K. Mano menyatakan bahwa:

Hasil perkebunan seperti ubi dan pisang biasanya diolah menjadi makanan ringan seperti keripik/makanan ringan lainnya untuk dijual atau di simpan pada tempat usaha kecil seperti warung atau kios tetapi bisa diolah untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Sedangkan untuk dikirim ke luar seperti ke timor leste itu tidak ada<sup>37</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penulis menyimpulkan bahwa, mobilitas barang dan jasa di desa tersebut masih bersifat lokal dan terbatas. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, dan hasil perkebunan seperti ubi, pisang, jagung, serta padi umumnya diolah untuk konsumsi pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Sebagian hasil pertanian juga dijual ke pasar lokal yang berada di Kota Kefamenanu atau diolah menjadi makanan ringan untuk dijual di warung dan kios setempat oleh pengusaha UMKM. Meskipun ada pengusaha yang mengambil barang dari luar, termasuk dari Timor Leste, pergerakan barang dari Desa Napan ke negara tetangga belum terjadi, sehingga mobilitas antarnegara belum berjalan secara aktif dari sisi ekspor barang oleh masyarakat desa. Namun, keberadaan PLBN Napan dinilai memiliki potensi strategis untuk

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>35</sup>Wawancara dengan Ibu Gedrudis Eko selaku Aparat Desa Napan, tanggal 18 Februari 2025

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Jose Beno selaku warga Desa Napan, tanggal 13 Februari 2025

<sup>37</sup>Wawancara dengan Ibu Maria K. Mano selaku Pengusaha UMKM Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

meningkatkan mobilitas barang dan jasa di masa depan, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki kerja sama dengan pihak di Timor Leste.

### **Mobilitas/Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baru adalah kawasan atau wilayah yang dikembangkan secara strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi, investasi, dan perdagangan di luar pusat-pusat ekonomi utama yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan mengurangi kesenjangan regional serta membuka lapangan kerja dan peluang usaha baru. Kawasan ini biasanya dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, seperti kawasan industri, pelabuhan atau pusat logistik guna menarik investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan menyatakan bahwa:

Untuk pusat pertumbuhan ekonomi di Desa Napan sebenarnya telah ada sebelum pembangunan PLBN. Namun, sejak keberadaan PLBN, berbagai usaha kecil mengalami perkembangan pesat karena banyaknya peluang yang masuk. Hal ini mendorong tumbuhnya jumlah pengusaha di Desa Napan semakin meningkat. Menurut saya manfaat pembangunan PLBN ini membawa keuntungan bagi masyarakat karena pembangunan ini banyak membawa manfaat konkret yang dirasakan oleh masyarakat seperti peluang untuk membukakan usaha, peningkatan pendapatan baru dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah perbatasan<sup>38</sup>.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Maria Nulle selaku Pengusaha di Desa Napan menyatakan bahwa:

Usaha kecil seperti kios dan warung dulunya masih tergolong usaha skala kecil. Namun, sejak pembangunan PLBN, banyak masyarakat mulai berinisiatif membuka usaha yang lebih besar. Saat ini, sudah banyak usaha yang berdiri di sekitar PLBN karena adanya peluang yang sangat menjanjikan. Ibu Maria juga menyampaikan bahwa ia menjalankan usaha ekspor barang, seperti bendera, dari Timor Leste ke Indonesia. Usaha ini biasa dikenal dengan sebutan "*Kutulaka*"<sup>39</sup>.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Maria K. Mano selaku Pengusaha UMKM di Desa Napan menyatakan bahwa:

Pada awalnya saya hanya menjalankan usaha kecil di area yang kini menjadi lokasi pembangunan PLBN, karena saat itu belum mengetahui akan adanya pembangunan tersebut. Namun, setelah PLBN dibangun, saya kembali membuka usaha di dekat kawasan PLBN. Seiring meningkatnya jumlah pengunjung, semakin banyak pula peluang usaha yang datang, sehingga usahanya yang semula berskala kecil kini mulai berkembang. Saya juga sangat mendukung pembangunan PLBN karena memberikan banyak peluang bagi para pelaku usaha<sup>40</sup>.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Martinus Taeki selaku Tokoh Adat di Desa Napan menyatakan bahwa:

Sebelum pembangunan PLBN ini banyak usaha yang dibuka oleh masyarakat di Desa Napan tapi waktu itu masih usaha kecil-kecilan, tetapi pada saat pembangunan PLBN banyak pengusaha yang mulai termotivasi untuk membuka usahanya lebih besar karena banyaknya pengunjung bukan hanya di dalam daerah kita saja tetapi dari luar daerah juga berkunjung ke tempat ini. Sehingga banyak peluang yang masuk untuk para

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Wendelinus Kefi selaku Kepala Desa Napan, tanggal 20 Februari 2025

<sup>39</sup>Wawancara dengan Ibu Maria Nulle selaku Pengusaha di Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ibu Maria K. Mano selaku Pengusaha UMKM Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

pengusaha disekitar PLBN, sehingga menurut saya pembangunan PLBN ini membawa manfaat dan keuntungan yang baik terhadap kami masyarakat perbatasan<sup>41</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Napan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan PLBN di wilayah tersebut telah mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru yang signifikan. Sebelum PLBN dibangun, usaha masyarakat masih berskala kecil, namun setelah keberadaannya, terjadi peningkatan jumlah dan skala usaha, termasuk munculnya inisiatif ekspor-impor seperti "*Kutulaka*". Infrastruktur PLBN membuka peluang usaha baru, menarik pengunjung dari luar daerah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa PLBN berperan penting sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM dan aktivitas perdagangan di Desa Napan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara" dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan berdasarkan hasil analisis, sarana pendidikan dari TK hingga SMA/SMK di Desa Napan umumnya sudah tersedia, meski sekolah menengah masih banyak berada di luar desa. Keberadaan PLBN meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, namun masih terdapat kekurangan guru di tingkat PAUD dan SD akibat pensiunnya tenaga pendidik, sehingga perlu perhatian lebih pada jenjang dasar.
2. Kemudahan Aksesibilitas Kesehatan berdasarkan hasil analisis, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Polindes di Desa Napan telah dibangun sebelum PLBN dan mempermudah akses layanan kesehatan. Tenaga medis dinilai cukup, namun masih ada kekurangan obat dan alat medis untuk kasus darurat. Pembangunan PLBN turut mendorong peningkatan infrastruktur dan perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan di perbatasan.
3. Infrastruktur Jalan dapat disimpulkan bahwa, pembangunan infrastruktur di Desa Napan, terutama sejak hadirnya PLBN, telah mengalami kemajuan pesat dengan adanya jalan raya, jembatan, rumah layak huni, dan pos keamanan yang meningkatkan mobilitas dan keamanan warga. Meski jalan dusun masih membutuhkan perhatian, serta gangguan jaringan telekomunikasi masih terjadi, secara keseluruhan infrastruktur yang ada sangat mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan. Jalan tikus juga masih dimanfaatkan warga untuk akses ke Timor Leste, terutama bagi yang tidak memiliki paspor.
4. Mobilitas barang dan jasa di Desa Napan masih bersifat lokal, dengan hasil pertanian umumnya untuk konsumsi sendiri atau dijual di pasar lokal. Ekspor ke Timor Leste belum berjalan, meskipun ada pengusaha yang mengimpor barang dari sana. Keberadaan PLBN Napan memiliki potensi strategis untuk mendorong mobilitas antarnegara di masa depan.
5. Mobilitas/Pusat Pertumbuhan Ekonomi berdasar hasil analisis, pembangunan PLBN di Desa Napan mendorong pertumbuhan ekonomi baru dengan meningkatnya jumlah dan skala usaha masyarakat, termasuk aktivitas ekspor-impor seperti "*Kutulaka*". PLBN membuka peluang usaha, menarik pengunjung, dan meningkatkan

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Martinus Taeki selaku Tokoh Adat Desa Napan, tanggal 14 Februari 2025

pendapatan, sehingga berperan penting dalam pengembangan UMKM dan perdagangan di wilayah perbatasan.

Sehingga dari pembangunan PLBN Napan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Manfaat yang dirasakan mencakup terbukanya lapangan kerja, bertumbuhnya usaha mikro, peningkatan pendapatan, serta perbaikan infrastruktur desa. Selain itu, pembangunan PLBN juga mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melanjutkan pendidikan demi memenuhi syarat pekerjaan yang kini menuntut kualifikasi formal. Meski awalnya terjadi penggusuran lahan, pemerintah memberikan ganti rugi dan peluang kerja kepada warga yang terdampak, sehingga secara keseluruhan, kehadiran PLBN menjadi titik awal pertumbuhan dan perubahan positif bagi masyarakat Desa Napan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, khususnya dengan menambah tenaga pendidik PAUD dan SD serta membangun fasilitas pendidikan menengah di Desa Napan. Di bidang kesehatan, perlu peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat medis, dan fasilitas darurat seperti ambulans dan layanan kesehatan keliling. Pemerintah juga diharapkan memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur dusun, perbaikan jaringan telekomunikasi, serta percepatan operasional penuh PLBN. Selain itu, perlu penguatan potensi ekspor melalui pelatihan dan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha lokal, serta pengembangan UMKM melalui pendampingan, akses pasar, dan legalitas usaha. Terakhir, pengawasan jalan tikus perlu ditingkatkan agar tidak disalahgunakan, serta masyarakat perlu diedukasi tentang prosedur lintas batas yang legal. Diharapkan saran-saran ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan PLBN memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat perbatasan di Desa Napan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Deddy Koespramoedyo. (2003). Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
- Dr. Rusmiyati, M.Hum, dkk (2022), Manajemen Perbatasan, Penerbit Cendekia Press-Bandung
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muta'ali Lutfi. (2014). Pengembangan Kawasan Perbatasan. Badan Penerbit Fakultas Geografi. UGM: Yogyakarta.
- Nur Aslamiah Supli dan Azhar. Inovasi Sains untuk pembangunan Perbatasan Indonesia dan Manfaat Pembangunan Kawasan Perbatasan Entikong dalam Perspektif Keamanan Manusia (Human Security). Gadjah Mada University Press. Perguruan Tinggi untuk Perbatasan (FOPERTAS). No. 21, Hlm. 324.
- Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia .
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan Bandung.
- Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wijaya, T. (2018). Manajemen Kualitas Jasa. Jakarta: PT. Indeks.

### **Jurnal**

- Ferdaus. (2018). Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura, Indonesia Vol. 3.
- Fetrushio Finambello TM dan Agung Subprojo. (2019). Analisis Pengaruh Pembangunan Pos

- Lintas Batas Negara terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perbatasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* . Program Studi Administrasi Publik, FISIP. Vol. 8 No. 2.
- Kule Jesly. (2016). Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau). *Jurnal Pemerintahan Integratif, FISIP Universitas Wulawarman*. Vol. 4, No. 3.
- Maisondra. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Katulistiwa (JIPSK)*, Vol. VIII, No. 02.
- Pian Deri. (2021). Identifikasi Kondisi Terkini PLBN Aruk Kecamatan Saringan Besar Kabupaten Sambas. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* . Universitas Tanjungpura Pontianak. Vol. 14.
- Rini Widyantini (Sekertaris Kementrian PAN dan RA). (2022). Kedepankan Tiga Prinsip Pengembangan Grand Design Pengelolaan Perbatasan. 19 Januari.
- Soegijoko. (Oktober 1994). Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan. *Jurnal Pwk* . Nomor 15.
- Tarti Nurgiyanti. (2023). Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam Mengatasi Illegal di Wilayah Perbatasan RI-RDTL. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* . Vol. 2, No. 1.
- Yanto, Y. 22 Agustus (2024). Manfaat Pembangunan PLBN bagi Masyarakat Perbatasan.
- Peraturan/Undang-Undang**
- Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BNPP. (2021). Tipologi Pos Lintas Batas Negara, Nomor 1 tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
- Undang-Undang Republik Indoensia, Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 6.